

Analisis Diskursus Indonesia Dalam Forum *the Archipelagic and Island State* (AIS) 2023

Syahri Ridani

*Department of International Relations, University of Indonesia
Depok, Indonesia 10430*

Abstract

The Archipelagic and Island States (AIS) Forum is a platform for island nations, regardless of their region, size, or level of development, aimed at addressing global challenges related to the sustainable use of marine resources, climate change resilience, marine pollution, emergency management, and the promotion of sustainable fisheries. Countries use international forums as the main instruments to tackle common issues in global politics. These forums are crucial for dialogue, where delegates meet and communicate through verbal and non-verbal language to express their concerns, share their views, and work towards reaching agreements. Initiated by Indonesia, the forum fosters new discourse among various international actors. This phenomenon raises the research question: How does Indonesia introduce and shape the discourse on marine development, climate change mitigation, and marine pollution management within the AIS Forum? The paper employs a constructivist paradigm to answer this research question, examining how Indonesia brings these issues into the AIS Forum, thereby creating a social construct within it. The research will utilize a qualitative, interpretative approach, employing data triangulation techniques that include interviews, literature reviews, and necessary documents. Consequently, the data sources will be secondary data.

Keywords: *Achipelagic and Island States(AIS)*, Constructivism, Indonesia

Abstrak

*The Archipelagic and Island States (AIS) atau Forum Negara Kepulauan adalah sebuah platform bagi negara-negara kepulauan tanpa memandang wilayah, ukuran dan tingkat pembangunannya yang memiliki inisiasi global untuk mengatasi tantangan penggunaan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, polusi laut, manajemen darurat dan peningkatan perikanan berkelanjutan. Forum internasional adalah instrumen utama yang digunakan oleh negara-negara untuk menangani masalah-masalah bersama dalam politik global. Yang terpenting, forum-forum ini merupakan tempat dialog, proses interaktif di mana para delegasi bertemu dan berkomunikasi melalui bahasa verbal dan non-verbal untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, berbagi pandangan, dan berupaya mencapai kesepakatan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, tulisan ini akan menggunakan paradigma konstruktivisme. Teori ini akan melihat bagaimana Indonesia membawa diskursus ini ke dalam forum *The Archipelagic and Island States* (AIS) sehingga menciptakan konstruksi sosial di dalam forum AIS. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat interpretatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi dengan mengambil data kolaborasi wawancara, studi Pustaka dan juga dokumen yang diperlukan sehingga sumber data yang akan diperoleh ialah data sekunder*

Kata kunci: *Achipelagic and Island States(AIS)*, Indonesia, konstruktivisme.

1. PENDAHULUAN

Forum internasional merupakan salah satu isu bahasan dalam studi hubungan internasional karena didalam forum internasional terdapat interaksi aktor-aktor yang secara multilateral mendiskusikan dan menciptakan sebuah fenomena sosial yang dipercaya dalam forum tersebut. hal ini selaras dengan pendapat oleh Kotzian mengatakan bahwa kelompok pemerintahan atau kelompok sosial yang bergabung dalam norma internasional atau forum internasional ialah untuk menindaklanjuti kepentingan mereka dengan aktor lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam forum internasional (Kotzian, 2007). Salah satu forum yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 10-11 oktober 2023 ialah Konferensi Tingkat Tinggi *The Archipelagic and Island States (AIS) Forum*. (Kemlu, 2023)

The Archipelagic and Island States (AIS) Forum ialah wadah perkumpulan negara-negara kepulauan tanpa memandang wilayah, ukuran, dan level pembangunan yang memiliki inisiasi bersama 51 negara anggota lainnya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi kedepan mengenai pengelolaan laut dan juga perubahan iklim yang dampaknya akan sangat dirasakan oleh negara-negara kepulauan . Kehadiran Forum AIS ini kedepannya akan melengkapi organisasi-organisasi internasional besar yang sudah ada seperti ASEAN, Uni Eropa, G20 dan yang lainnya (Administrator, 2023). Menurut Odo Manahutu sebagai Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menegaskan bahwa forum AIS ini akan dirasakan dampaknya setelah 10-15 tahun kedepan dalam artian bahwa hal ini merupakan sebuah fondasi bagi negara-negara kepulauan untuk menhadapai tantangan sebagai negara kepulauan di dunia(Kristantyo, 2023). AIS Forum resmi dibentuk pada tanggal 1 November 2018 melalui Deklarasi Bersama Manado pada pertemuan tingkat Menteri pertama negara-negara peserta. Diskusi mengenai pembentukan forum ini ialah ketika sebelumnya terdapat Konferensi Kelautan 2017 di New York, Amerika Serikat. Setelah acara tersebut, kemudian dilaksanakan konferensi lanjutan forum negara kepulauan ini di Jakarta. Pemahaman dari negara-negara awal AIS itu kemudian yang mengantar forum ini resmi dibentuk yang memiliki empat bidang fokus yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, sampah plastik laut, tata Kelola maritim yang baik (Advento, 2023). Salah satu negara yang tergabung dan menginisiasi dalam Forum AIS ini ialah Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 18,108 pulau dan 2,8 juta km perairan laut. Hal ini menjadi karakteristik negara Indonesia dan memiliki banyak sekali budaya maritim yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia (Criib, 2009). Berdasarkan hasil konvensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang tercantum dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS* di Jamaika 10 Desember 1982 menyatakan bahwa luas laut wilayah Indonesia ialah 3.257.357 km persegi namun itu belum dihitung jika Indonesia memasukkan luas laut berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil atau 321,8 km dari garis dasar pantai. Berdasarkan acuan dari *UNCLOS* dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE maka total perairan Indonesia Seluas 6.476.285 km persegi, dibandingkan dengan luas daratan hanya 1.919.440 km persegi. Kemudian letak Indonesia sangat strategis yang dilewati oleh khatulistiwa serta diapit dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Sehingga hal ini lah menjadi sebab potensi perikanan Indonesia mencapai 12,5 juta ton pertahunnya. Kendati demikian, Sebagian besar potensi laut Indonesia dan beserta tantangannya seperti perubahan iklim menjadikan fondasi dasar dalam pembentukan forum AIS yang Sebagian besar anggotanya berasal dari negara yang berpendapatan rendah dan menengah, hanya saja mereka pemilik wilayah perairan. Oleh karena itu, ketika Menko Marines Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa forum ini mengajak para anggotanya untuk mengoptimalkan laut sehat yang berkelanjutan berdasarkan solidaritas, keadilan, dan timbal balik(Anton, 2022). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki pondasi yang kuat dalam mengantarkan diskursusnya didalam Forum AIS ini. Hal ini sangat tepat mengingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga hal ini

dapat diterima oleh beberapa negara kepulauan lainnya bahwa mitigasi dan tata kelola laut di inisiasi oleh Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi pembentukan Forum AIS ini yang sukses secara seremonial di selenggarakan di Bali, Indonesia. Indonesia telah membawa diskursus mengenai sektor pembangunan laut, mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan pencemaran laut di forum tersebut sehingga memunculkan sebuah pemaknaan fenomena yang secara bersama-sama disepakati oleh negara-negara anggota Forum AIS lainnya (Administrator, 2023). Beberapa program-program Forum AIS merefleksikan diskursus yang di inisiasi oleh Indonesia. Program tersebut secara konsisten dilaksanakan setiap tahunnya seperti *Blue Economy Development Index*, *Innovative Financing*, *Business Acceleration Program*, dan *Womenpreneur*. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini yang ditekankan adalah diskursus Indonesia dalam Forum AIS 2023.

Melihat fenomena tersebut. penulis melihat adanya signifikansi penelitian ini yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian sebelumnya seperti yang ditulis oleh Belardo dan kawan-kawan yang berjudul "*The Concept Of Archipelago And Archipelagic State Insights : From Indonesia To The International World*" hanya menjelaskan tentang konsep yang dibangun oleh Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982, sedangkan Penelitian ini akan melihat proses Indonesia membawa diskursus tersebut ke dalam forum AIS yang dimana forum ini adalah forum pertama kali yang diadakan di Bali, Indonesia. Indonesia merupakan salah satu mitra dari Kerjasama regional *Pacific Island Forum* (PIF) sejak tahun 2001 , Namun, di tahun 2017 sampai 2023 saat ini, Indonesia juga menginisiasi AIS Forum yang merupakan Kerjasama regional negara-negara kepulauan. Oleh karena itu, hal ini memunculkan pertanyaan penelitian bahwa bagaimana Indonesia mengajukan diskursus sektor pembangunan kelautan, mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan pencemaran laut di forum AIS?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan teori konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Paradigma Konstruktivisme

Dalam studi Hubungan Internasional, teori Konstruktivisme hadir untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional dengan variabel lain dengan memahami paham ini tidak menitikberatkan mengenai *power* yang menjadi asumsi dasar dari teori klasik hubungan internasional lainnya seperti realisme dan liberalisme. Menurut paham konstruktivisme, aspek identitas tidak kalah menarik menjadi fondasi utama sebagai analisis utama yang dapat mempengaruhi aspek mayor (ekonomi dan historis) dalam melihat fenomena hubungan internasional.

Konstruktivisme pada dasarnya memiliki empat asumsi. Pertama, konstruktivisme berupaya untuk mempermasalahkan identitas dan kepentingan negara. Mereka menekankan pentingnya pertukaran tindakan subjektif dan intersubjektif yang dilakukan oleh manusia sebagai agen dari entitas organisasi negara dan non-negara tersebut. Kedua, konstruktivisme melihat struktur internasional dalam kaitannya dengan struktur sosial yang dipenuhi dengan faktor-faktor ideasional yang mencakup norma, aturan dan hukum. Struktur ini bisa mempengaruhi identitas dan kepentingan agen. Ketiga, konstruktivisme memandang dunia ini merupakan proyek yang selalu dikonstruksi, sebuah kasus yang menjadi dan bukan menjadi ada. Keempat, kaum konstruktivis telah berfikir mengenai perdebatan isu ontologi dan epistemologi. Perdebatan dan diskusi seperti ini sangat jauh berbeda dengan teori kausal yang mana premis-premis positivis mengarahkan para ahli teori dengan percaya diri mencari penjelasan subjektif mengenai realitas dengan cara meminimalkan bagian subjektif dari pemahaman kita. Mengingat subjektivitas manusia, konstruktivisme memandang ketidakmungkinan objektivitas murni (Kauppi & Viotti, 2020).

Dalam paham ini terdapat hal-hal penting untuk dipahami mengenai tentang intersubjektifitas, struktur, aturan, norma, agen, identitas dan logika kesesuaian. Intersubjektifitas dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dimiliki bersama oleh manusia

melalui pertukaran komponen ideasional dalam hubungan internasional yang berarti di institusionalisasi ide-ide kolektif ini ditetapkan atau dibentuk dalam tatanan dunia sosial sebagai struktur atau institusi, praktik, dan identitas. Norma dan aturan bersama ini menetapkan ekspektasi tentang cara kerja dunia dan perilaku yang dipercayai sah. Kemudian untuk membuat hal ini lebih mudah dipahami, terdapat tiga contoh untuk memperjelas penekanan konstruktivisme pada norma dan aturan yang dimiliki bersama dan dilembagakan secara intersubjektif. Pertama, mengenai konstruksi sosial dari konsep kedaulatan. Kedaulatan ini terdiri dari seperangkat aturan atau standar perilaku yang memberikan panduan bagi negara-negara berinteraksi satu sama lain (relasi sosial negara). Secara khusus, negara-negara yang berdaulat menuntut berdasarkan hukum internasional hak untuk melengkapi yurisdiksi atas wilayah mereka sendiri (dimensi internal). Oleh karena itu, berkembangnya norma internasional yang menetapkan tidak adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri oleh negara lain. Kedua, negara klaim bahwa sebuah hak independen atau otonom didalam melaksanakan hubungan luar negeri mereka (eksternal negara/dimensi internasional). Oleh karena itu, kedaulatan bukan hanya milik masing-masing negara, namun dapat dipandang sebagai institusi atau struktur normatif antar negara yang dimiliki bersama secara intersubjektif dan dibangun secara sosial.

Kedaulatan diekspresikan melalui aturan perilaku. Praktik-praktik ini mencerminkan pemahaman bersama mengenai penyediaan ketertiban dalam sistem internasional, menstabilkan para aktor dan mengelola hubungan kekuasaan. Demikian pula, pengembangan norma integritas teritorial membantu memperkuat norma kedaulatan dengan mengakui kesucian batas-batas negara yang dibangun secara sosial.

Kemudian, hal yang lain juga terkait dengan ini adalah norma. Norma secara umum menerima nilai-nilai yang didefinisikan sebagai standar perilaku untuk agen yang telah diberikan sebuah identitas. Berdasarkan hal tersebut, dalam situasi dimana norma berfungsi sebagai aturan yang menentukan identitas seorang agen, norma tersebut dapat dikatakan memiliki "efek konstitutif" yang menentukan tindakan apa yang akan menyebabkan orang lain yang relevan mengenali identitas tertentu. Di sisi lain, norma berfungsi sebagai standar yang menetapkan pemberlakuan yang tepat atas identitas yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, norma mempunyai "efek regulatif" yang menentukan standar perilaku yang sepatutnya. Oleh karena itu, norma dapat mendefinisikan (membentuk) identitas atau menentukan (mengatur) perilaku atau keduanya dapat berlaku (Peter Katzenstein, 1996). Norma ini dapat berkembang berasal dari internasional dan domestik. Ketika norma-norma berbentuk keyakinan yang berprinsip (seperti dukungan terhadap dekolonisasi, berakhirnya apartheid, hak asasi manusia, munculnya tabu terhadap jenis senjata tertentu, larangan penyusunan terhadap pejabat pemerintah sebagai cara untuk mendapatkan kontrak), norma-norma tersebut dapat mengarah pada dalam keadaan tertentu kepada negara-negara yang mendefinisikan kembali kepentingan dan identitas mereka serta mempengaruhi hasil-hasil internasional. Dampak dari keyakinan ini dapat difasilitasi oleh jaringan transnasional yang terdiri dari aktor-aktor negara atau non-negara (V. P. Shannon, 2000).

Tidak kalah penting dalam paham ini adalah membahas mengenai peranan agen atau aktor dalam hubungan internasional. Menurut paham konstruktivis, semua agen memiliki potensi untuk mempengaruhi pembentukan norma internasional, identitas dan juga perilaku negara. Seperti yang dijelaskan diatas, struktur bisa mendorong agen untuk mendefinisikan ulang kepentingan dan identitas mereka di sebagai proses sosialisasi yang sedang berjalan. Tidak seperti neorealisme dan neoliberalisme, konstruktivisme tertarik bagaimana struktur ideasional sebenarnya membentuk bagaimana agen/aktor mendefinisikan diri mereka dan relasinya dengan aktor-aktor yang lain. Asumsi selanjutnya, para agen/aktor ini mempunyai dampak terhadap struktur dan bagaimana mereka diubah dan diproduksi. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah agen/aktor dan struktur saling membentuk satu sama lain (Barnett & Finnemore, 1999).

Bahasan selanjutnya didalam paradigma konstruktivisme ialah kepentingan. Kaum konstruktivisme mengklaim bahwa kepentingan para aktor dikonstruksi dan dapat diubah oleh

para aktor itu sendiri ketika mereka berinteraksi dengan aktor lain. Namun para konstruktivis berpendapat bahwa kepentingan dan pemahaman tentang peluang dan ancaman sangatlah subyektif. Seperti contoh konstruktivis yang populer melihat bagaimana mungkin 500 senjata nuklir milik Inggris tidak terlalu mengancam (atau bahkan tidak mengancam) kepentingan Amerika Serikat dibandingkan sejumlah kecil senjata nuklir Korea Utara atau Iran. Hal ini telah jelas bahwa perkataan dan perbuatan Korea Utara dan Iran telah membuat Amerika Serikat memandang Korea Utara dan Iran sebagai negara yang bermusuhan dan dengan demikian merupakan ancaman terhadap kepentingan mereka. Disinilah kaum konstruktivis berargumentasi bahwa para pemimpin Amerika Serikat merespon dimensi sosial hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara lain, bukan sekadar menanggapi perangkat keras nuklir yang mereka miliki (Finnemore, 1999).

b. Model Analisis

Teori konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana Indonesia membawa diskursus sektor pembangunan laut, mitigasi perubahan iklim, dan pencegahan laut dalam forum tersebut. Terdapat tiga komponen utama dalam operasional teori ini. Pertama, Agen membentuk identitas yang dimana Indonesia berperan sebagai agen aktif yang membentuk identitasnya melalui partisipasi dan interaksi dalam Forum AIS 2023. Identitas ini dibangun berdasarkan posisi dan kepentingan Indonesia terkait isu-isu maritim global. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan forum tersebut untuk menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di sektor maritim, upaya mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan pencemaran laut. Identitas yang terbentuk ini mencerminkan nilai-nilai, kepentingan nasional, dan aspirasi Indonesia di kancah internasional. Kedua, Relasi sosial agen dimana proses pembentukan identitas oleh Indonesia tidak terjadi secara terisolasi, melainkan melalui relasi sosial dengan agen-agen lainnya dalam forum tersebut. Interaksi sosial antara delegasi Indonesia dengan delegasi dari negara lain, organisasi internasional, dan aktor-aktor non-negara memperkuat posisi Indonesia dalam diskursus maritim. Relasi sosial ini membantu Indonesia membangun jaringan Kerjasama, memperkuat aliansi strategis, dan memperoleh dukungan internasional terhadap inisiatif-inisiatif maritimnya. Relasi ini juga memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menangani isu-isu maritim secara kolektif. Ketiga, Penerimaan diskursus. Diskursus yang dibawa oleh Indonesia dalam Forum AIS 2023 ini akan masuk tahap penerimaan yang nantinya akan mencapai hasil yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Penerimaan ini menunjukkan bahwa diskursus yang dibawa oleh Indonesia relevan dan signifikan dalam konteks global. Untuk mencapai penerimaan ini, Indonesia harus mampu mengartikulasikan argumennya dengan jelas. Penerimaan ini juga mencerminkan pengakuan terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam menangani isu-isu maritim global.

Dengan mengoperasionalkan teori konstruktivisme melalui tiga komponen ini, penulis dapat menganalisis bagaimana Indonesia membentuk identitas maritimnya, menjalin relasi sosial yang mendukung, dan memastikan diskursusnya diterima secara luas dalam Forum AIS 2023. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi dan peran Indonesia dalam forum internasional terkait isu-isu maritim.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Teknik Penelitian

Ada tiga jenis penelitian, menurut Neuman (2014), yang dapat digunakan: Pertama adalah eksploratori, yang menyelidiki fenomena baru yang belum diketahui menggunakan data yang terbatas, kedua adalah eksplanatif yang menekankan pada menemukan alasan mengapa fenomena tertentu terjadi dan yang terakhir adalah deskriptif, yang menjelaskan situasi khusus yang dimulai dengan pertanyaan atau isu yang didefinisikan dan hasilnya adalah gambaran mendalam tentang masalah tersebut.

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan proses Indonesia membawa diskursus di Forum AIS tersebut. kemudian,

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deduktif untuk menganalisis topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan teori, konsep, dan perspektif yang berkaitan dengan hubungan internasional untuk menjelaskan bagaimana konsep berhubungan dengan fenomena yang diangkat serta bukti nyata. Teori yang digunakan ialah konstruktivisme dalam melihat bagaimana Indonesia membawa diskursus didalam Forum AIS 2023. Penelitian kualitatif biasanya memasukkan subjek dalam konteks sosio-historis dan menilai diri mereka sendiri. Untuk menemukan topik yang menarik atau relevan, beberapa penelitian kualitatif juga menekankan keyakinan pribadi, biografi, atau masalah tertentu. Selain itu, peneliti akan menemukan masalah untuk diselesaikan, mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menginterpretasikan temuan dengan menggunakan konsep dan interpretasi teoretikal (Neuman, 2014).

b. Jenis Data

Data kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis isu yang diangkat. Penulisan penelitian yang menggunakan data kualitatif merujuk pada Neuman (2014) yang mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata, gambar, atau objek dari sumber primer maupun sekunder yang terkait dengan bagaimana Indonesia membawa diskursus dalam Forum AIS 2023, dan akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. Data tersebut akan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan yang terdapat dalam teknik penelitian kualitatif (Neuman, 2014).

c. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Christopher Lamont dalam bukunya berjudul *Research Methods in International Relations* (2015), terdapat 1) penelitian yang berbasis internet dalam hal ini, penulis akan merujuk pada sumber seperti media, jurnal, e-book, dan situs web resmi organisasi untuk merujuk pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini; 2) *archival and document-based research* yang terdiri atas dokumen primer utama, yaitu dokumen asli yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung terhadap suatu informasi atau ikut terlibat dalam suatu kejadian tertentu dan dokumen sekunder utama yang merujuk dan menganalisis pada dokumen primer utama yaitu dokumen resmi terkait dengan laporan mengenai Forum AIS 2023 ini. (Lamont, 2015).

d. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini merujuk pada Neuman (2014) saat mengolah data untuk penelitian ini, di mana tahapan pengolahan data dimulai dengan memilih teori, konsep, dan/atau perspektif yang berkaitan dengan hubungan internasional untuk menganalisis suatu masalah teori yang dipakai ialah teori konstruktivisme didalam menganalisa bagaimana Indonesia membawa diskursus dalam Forum AIS 2023.

4. PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan bagaimana proses Indonesia membawa diskursus sektor pembangunan kelautan, mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan pencemaran laut di forum AIS dengan menggunakan teori konstruktivisme dengan melihat beberapa proses-proses yang dilalui oleh Indonesia sehingga diskursus tersebut bisa menjadi sebuah realitas sosial dan norma yang dipercayai oleh seluruh anggota didalam Forum AIS ini.

a. Indonesia Sebagai Agen dalam Pembentukan Diskursus di Forum AIS 2023

Dalam pandangan konstruktivisme, agen merupakan elemen yang penting dalam pembentukan sebuah diskursus sehingga agen ini memiliki potensi membentuk sebuah norma sosial yang dipercaya dalam sebuah arena hubungan internasional. Oleh karena itu, didalam Forum AIS ini yang telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi di Bali merupakan inisiatif Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui Deklarasi Manado 2018 beserta 21 negara lainnya termasuk Republic of Cabo Verde, Republic of Cuba, Republic of Cyprus, Republic of Fiji, Republic of Guinea Bissau, Jamaica, State of Japan, Republic of Malta,

Democratic Republic of Madagascar, Independent State of Papua New Guinea, Republic of the Philippines, Federation of Saint Christopher and Nevis, Democratic Republic of Sao Tome and Principe, Republic of Seychelles, Republic of Singapore, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Republic of Suriname, Democratic Republic of Timor Leste, Kingdom of Tonga, and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Kemudian di KTT Forum AIS yang dilaksanakan di Bali beranggotakan 51 negara anggota tambahan yaitu Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Cook Islands, Comoro Islands, Dominica, Dominican Republic, Federated States of Micronesia, Grenada, Guyana, Haiti, Iceland, Kiribati, Madagascar, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, Niue, New Zealand, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, Trinidad and Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu (Advento, 2023).

Agen menurut Konstruktivis memiliki hal-hal yang dapat membentuk atau mendefinisikan identitasnya sehingga berusaha untuk mensosialisasikan identitas tersebut. Untuk pemenuhan identitas tersebut, agen memiliki kepentingan didalam penyampaian identitasnya sebagai aktor atau agen dalam hubungan internasional (Finemore, 1999). Indonesia dalam hal ini telah sejak lama mendefinisikan sebagai bangsa maritim atau negara kepulauan terbesar sehingga memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal kemaritiman. Kontribusinya bermula dengan adanya Deklarasi Juanda tahun 1957, yang menetapkan peraturan global mengenai Hukum Laut Global (UNCLOS) tahun 1982. Pada tahun 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudera Hindia, dan pada tahun 2018 menjadi pendorong Deklarasi Manado yang melahirkan Forum AIS. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri era Jokowi selalu mengatakan bahwa “sebagai negara maritim, Indonesia akan terus menjadi yang terdepan dalam mendukung Forum AIS sebagai Kerja sama inklusif bagi negara kepulauan” (Tsauro & Saraswati, 2023). Melihat wacana yang selalu diidentitaskan oleh Presiden sejak era pra kemerdekaan sampai pada era Jokowi mengenai negara maritim maka hal ini lah menjadi identitas Indonesia yang disosialisasikan di dalam hubungannya dengan negara lain.

Konstruktivisme juga melihat adanya kepentingan agen ketika mengkonstruksi wacana. Oleh karena itu ditemukan bahwa terdapat signifikansi KTT Forum AIS ini bagi Indonesia. Menurut Ahalla, pertama hal ini merefleksikan kembali status Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar diantara negara maritim. Seperti yang sudah disebutkan diatas, negara ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan peraturan kelautan global, dalam artian bahwa negara ini bertanggung jawab untuk memastikan penerapan yang tepat. Kedua, tujuan KTT ini mempromosikan “*Blue Economy*” yang dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan Indonesia. Dimana hal ini akan menguntungkan Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi biru telah menyumbang sekitar 3,6 % terhadap produk domestik bruto negara. Selama dua dekade mendatang, angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 12,45 %. Ketiga, KTT ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan upayanya melawan dampak perubahan iklim, sesuatu yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi negara ini. Naiknya permukaan air laut telah membanjiri Sebagian kepulauan Indonesia bahkan mengancam Sebagian pulau Jawa. Dalam beberapa dekade mendatang, beberapa pihak memperkirakan bahwa kota-kota, termasuk ibu kota Jakarta, akan terkena dampak kenaikan permukaan air laut dan kejadian cuaca ekstrem lainnya. Apalagi bencana alam seperti Tsunami dan gempa bumi yang sudah lama melanda nusantara. Untuk melindungi masyarakat, sistem mitigasi harus ditingkatkan dengan bekerjasama dengan mitra AIS seperti Jepang yang telah berhasil mempelajari dan memitigasi tsunami dan gempa bumi di lautan (Tsauro & Saraswati, 2023).

Salah satu isu penting yang belum terselesaikan dalam KTT ini adalah keamanan maritim, yang mempunyai manfaat langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara-negara anggota. Negara kepulauan dan kepulauan kaya akan sumber daya. Namun, mereka menghadapi banyak tantangan terkait ketidakamanan, pemberontakan bersenjata, dan kesulitan dalam menerapkan supremasi hukum baik di darat maupun di laut.

b. Relasi Indonesia Dengan Agen Lain di Dalam Forum AIS 2023

Konstruktivisme memandang bahwa didalam pembentukan norma sosial yang disepakati, terdapat proses relasi sosial yang secara natural agen-agen akan berdiskusi dan memberikan wacana masing-masing didalam forum tersebut. Biasanya setiap agen membawa diskursus yang sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing agen sehingga terdapat relasi yang kuat antar agen, didalam prosesnya, hal ini terdapat negosiasi para agen dengan menentukan titik tengah dalam pengambilan keputusan akhir. Dalam Forum AIS 2023 yang dilaksanakan di Bali merupakan Konferensi Tingkat Tinggi pertama yang diketuai oleh Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana Indonesia membawa diskursus sektor pembangunan kelautan, mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan pencemaran laut di forum AIS, hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan pidato Jokowi selaku Presiden Indonesia dan juga konferensi Pers yang telah dilakukan melalui kanal youtube Kompas.com. sebagai pembukaan untuk memulai KTT tersebut, video ditayangkan terlebih dahulu sebelum semua negara anggota berdiskusi. Video ini berisikan konten mengenai pencemaran di laut dan kehidupan sosial masyarakat pesisir serta mengenai program-program yang telah dilakukan Forum AIS ini (Channel Kompas.com, 2023 tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=QWK4nkhBybA>). Hal ini membuktikan bahwa untuk menguatkan diskursus tersebut maka perlu untuk menampilkan fakta di lapangan sebagai data mengenai pencemaran laut dan bagaimana seharusnya negara-negara harus memiliki Kerjasama tata Kelola laut yang inklusif diantara negara negara anggota.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pidato Jokowi yang menekankan pada penguatan kolaborasi antara negara kepulauan dan negara dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Sebagai sesama negara kepulauan dan pualu terlepas besar atau kecil, maju atau berkembang untuk bersama-sama berbagi tantangan kompleks bersama yang saling kait-mengkait dan saling terhubung satu sama lain seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut dan pencemaran laut. Oleh karena itu, sangat penting kolaborasi untuk menghasilkan Langkah-langkah strategis, konkrit, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama”

(Sumber: Youtube: KompasTV.Com 2023, diakses 20 April, 2024, tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=QWK4nkhBybA>)

Dari untaian kalimat pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo diatas menunjukkan bahwa Indonesia dan seluruh negara anggota lainnya adalah negara kepulauan yang memiliki hak yang sama dan tantangan yang sama, sehingga ini dimaknai sebagai realitas didalam negara-negara anggota walaupun tidak semua negara memiliki tantangan pencemaran laut dan tata kelola laut yang kurang baik sebagai contoh negara Singapura dan United Kingdom namun disamakan persepsi semua negara anggota untuk melakukan Kerjasama yang inklusif seperti yang pidato lanjutan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai berikut :

“Terdapat tiga prinsip didalam Forum AIS ini yaitu solidaritas, kesetaraan dan inklusivitas. Indonesia selalu membawa kepentingan negara berkembang dan negara kepulauan di seluruh pertemuan KTT baik G20, ASEAN dan Juga AIS”

(Sumber: Youtube: KompasTV.Com 2023, diakses 20 April, 2024, tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=QWK4nkhBybA>)

Kemudian setelah pidato disampaikan untuk mengawali pembukaan KTT Forum AIS 2023 ini dilanjutkan dengan pembahasan dalam Forum tersebut. Sesuai dengan keterangan Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Siti Nurbaya di Konferensi Pers yang diadakan setelah forum, menghasilkan prinsip-prinsip yang disepakati oleh semua negara anggota Forum AIS kemudian Presiden Jokowi menekankan dalam Forum tersebut bahwa negara anggota Forum AIS harus melakukan kolaborasi karena kolaborasi adalah kunci

kemajuan walaupun ditengah dunia yang terbelah. Selanjutnya disambung oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa didalam forum tersebut terdapat beberapa ajuan wacana yang disampaikan oleh beberapa negara anggota Forum AIS ini. Ajuan wacana tersebut mengenai pembangunan hutan atau *Forest Development* dalam hal ini fokus pada mangrove dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki 120 juta ha lahan mangrove disusul oleh Papua New Guinea memiliki 36 juta ha, Suriname 18 juta ha, dan Filipina kurang lebih 8 juta ha (Kompastv.com). Hal ini membuktikan bahwa terdapat relasi Indonesia yang dialektis didalam Forum AIS ini dengan beberapa negara-negara yang mengajukan mengenai pembangunan hutan tersebut sehingga menurut Menteri Siti Nurbaya hal ini menjadi sebuah pertimbangan didalam forum sehingga disepakati adanya program-program berkenaan dengan penanaman mangrove ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa para pemimpin-pemimpin negara sepakat pembentukan sebuah organisasi internasional, menjalin Kerjasama prioritas dalam hal ini fokus pada mitigasi perubahan iklim, ekonomi biru, *ecotourism*, sampah laut dan tata kelola maritim yang baik.

Dari keterangan pers ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat relasi yang dinamis antara Indonesia sebagai agen yang membawa diskursus mitigasi perubahan iklim, pencemaran laut, dan juga tata kelola maritim yang baik dengan negara-negara anggota Forum AIS lainnya sehingga adanya perkembangan diskusi tambahan mengenai pembangunan hutan terfokus pada mangrove di semua negara-negara anggota. Kontruksi wacana yang disampaikan oleh Indonesia dalam forum ini berjalan dengan mulus namun terjadi perkembangan diskusi sehingga Indonesia dan negara anggota lainnya sepakat dan mempercayai adanya pencemaran sampah di laut, mitigasi perubahan iklim, tata kelola maritim yang baik serta ajuan tambahan mengenai pembangunan hutan khususnya mangrove di negara-negara anggota. Konstruktivisme memandang hal ini merupakan hal natural sebagai agen didalam sebuah diskusi wacana yang disampaikan hingga wacana tersebut disepakati. Oleh karena itu program-program Forum AIS ini merefleksikan dari wacana tersebut. Beberapa program nya ialah *Empowering coastal future through corporate social responsibility and environment, social and governance values, Promoting public participation to support coastal communities and climate resilience, Visual storyselling for sustainable ocean governance and blue entrepreneurship, the journey of a 1000 mangrove seedlings, AIS Ambassador event : Clean-up campaign and community awareness on plastic pollution in Solomon Islands, Bioreeftek: Restoring coral ecosystem at Jayapura's coastline* (Advento, 2023). Program-program diatas merupakan kristalisasi dari wacana yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Forum AIS.

5. KESIMPULAN

Dalam proses Indonesia mengajukan diskursus sektor pembangunan kelautan, mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan pencemaran laut di forum AIS ini terlihat bahwa Indonesia merupakan agen dalam hubungan internasional yang berusaha untuk menciptakan sebuah realitas sosial didalam sebuah forum internasional dimana konstruktivisme menerangkan bahwa agen dapat menciptakan realitas dalam struktur untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini Indonesia memiliki kepentingan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seperti konsep ekonomi biru akan menguntungkan Indonesia dan juga Kerjasama pengelolaan sampah laut dan tata kelola maritim yang baik dari organisasi ini. Kemudian konstruktivisme juga menitikberatkan bahwa dalam proses nya , agen akan menemukan secara natural relasi-relasi dari agen lain dalam hal pembahasan atau pembentukan wacana yang berlangsung.

REFERENSI

- AIS Forum (2023). *KTT AIS Forum: Kolaborasi Negara Pulau dan Kepulauan Hadapi Tantangan Global*. (online), Available at : <https://maritim.go.id/detail/ktt-ais-forum-kolaborasi-negara-pulau-dan-kepulauan-hadapi-tantangan-global>
- Advento, C. S. (2023). *Apa itu KTT AIS Forum, Sejarah Terbentuknya di Manado dan 51 Negara Anggotanya*. (online), Available at : <https://voi.id/berita/318302/apa-itu-ktt-ais-forum>
- Anton, S. (2022). *AIS Forum Menuju Laut dan Lestari*. (online), Available at : <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6737/ais-forum-menuju-laut-sehat-dan-lestari?lang=1>
- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999). The politics, power, and pathologies of international organizations. *International Organization*, 53(4), 699-732. <https://doi.org/10.1162/002081899551048>
- Kauppi, M. V., & Viotti, P. R. (2020). *International relations theory* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Kemlu. (2023). *KTT AIS Forum 2023 Sepakati Peningkatan Kerja Sama Inklusif, Setara, dan Solid*. Kemlu. <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/26685/ktt-ais-forum-2023-sepakati-peningkatan-kerja-sama-inklusif-setara-dan-solid>
- Kristantyo, W. (2023). *KTT AIS 2023 Upaya Indonesia Memperkuat Kolaborasi Negara-Negara Kepulauan*. (online), Available at : <https://www.indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7527/ktt-ais-2023-upaya-indonesia-memperkuat-kolaborasi-negara-negara-kepulauan?lang=1>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh). Pearson.
- Peter Katzenstein. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in International Politics*. Columbia University Press, 5.
- Tsauro, & Saraswati. (2023). *The Significance of Indonesia's Hosting of the Archipelago and Island States Forum*. (online), Available at : <https://thediplomat.com/2023/11/the-significance-of-indonesias-hosting-of-the-archipelago-and-island-states-forum/>
- V. P. Shannon. (2000). Norms Are What States Make of Them: The Political Psychology of Norm Violation. *International Studies Quarterly*